



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kode Pos 59313
 Telp. (0291) 444164 – 444167 Fax (0291) 436300

Kudus, 22 Maret 2022

Nomor : 005/1738/08.01/2022
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Penyusunan Dokumen
 Rencana Tindak
 Pengendalian (RTP)

Kepada :

Yth. (daftar terlampir)

di -

KUDUS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Unit Kerja wajib untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungan kerjanya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diwajibkan untuk menyusun Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sub Kegiatan Tahun 2022 **paling lambat 15 April 2022**. Dokumen RTP harap disampaikan ke Inspektoriat Daerah Kabupaten Kudus. Penyusunan Dokumen RTP berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kudus

Lampiran Surat Sekda Kab Kudus

Nomor : 076/1728/08.01/2022

Tanggal : 22 - 1 - 2022

DAFTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

1. BAPPEDA
2. BKPP
3. BPPKAD
4. BPBD
5. SEKRETARIS DRPD
6. DISDIKPORA
7. DISBUDPAR
8. DINAS KESEHATAN
9. DINAS SOSIAL P3AP2KB
10. DINAS PMD
11. DINAS DUKCAPIL
12. DINAS PMPTSP
13. DINAS NAKER, PERINKOP & UKM
14. DINAS PERDAGANGAN
15. DINAS KOMINFO
16. DINAS PERHUBUNGAN
17. DINAS PUPR
18. DINAS PKPLH
19. DINAS PERTANPANGAN
20. DINAS ARPUS
21. SATPOL PP
22. RSUD dr LOEKMONOHADI
23. KANTOR KESBANGPOL
24. BAG. PEMERINTAHAN
25. BAG. HUKUM
26. BAG. KESRA
27. BAG. PEREKONOMIAN
28. BAG. ADBANG
29. BAG. PBJ
30. BAG. ORGANISASI
31. BAG. UMUM
32. BAG. PROTOKOL & KOMPIM
33. KEC. KOTA KUDUS
34. KEC. MEJOBLO
35. KEC. DAWE
36. KEC. UNDAAN
37. KEC. JEKULO
38. KEC. KALIWUNGU
39. KEC. JATI
40. KEC. BAE
41. KEC. GEBOG
42. DIRUT PDAM
43. DIRUT PD. PERCETAKAN
44. UPT PUSKESMAS BAE
45. UPT PUSKESMAS DAWE
46. UPT PUSKESMAS GONDOSARI
47. UPT PUSKESMAS GRIBIG
48. UPT PUSKESMAS JATI
49. UPT PUSKESMAS JEKULO
50. UPT PUSKESMAS JEPANG
51. UPT PUSKESMAS KALIWUNGU
52. UPT PUSKESMAS MEJOBLO
53. UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON
54. UPT PUSKESMAS NGENGLAK
55. UPT PUSKESMAS PURWOSARI
56. UPT PUSKESMAS REJOSARI
57. UPT PUSKESMAS RENDENG
58. UPT PUSKESMAS SIDOREKSO
59. UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO
60. UPT PUSKESMAS UNDAAN
61. UPT PUSKESMAS WERGU WETAN
62. UPT PUSKESMAS DERSALAM
63. SMP 1 KUDUS
64. SMP 2 KUDUS
65. SMP 3 KUDUS
66. SMP 4 KUDUS
67. SMP 5 KUDUS
68. SMP 1 JATI
69. SMP 2 JATI
70. SMP 1 BAE
71. SMP 2 BAE
72. SMP 3 BAE
73. SMP 4 BAE
74. SMP 1 JEKULO
75. SMP 2 JEKULO
76. SMP 3 JEKULO
77. SMP 1 MEJOBLO
78. SMP 2 MEJOBLO
79. SMP 1 UNDAAN
80. SMP 2 UNDAAN
81. SMP 1 DAWE
82. SMP 2 DAWE
83. SMP 3 DAWE
84. SMP 1 KALIWUNGU
85. SMP 2 KALIWUNGU
86. SMP 1 GEBOG
87. SMP 2 GEBOG
88. SMP SATAP GEBOG
89. SMP SATAP UNDAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIS DAERAH

SETDA
DAFTAR SAMANI NTA KORIS, ST. MT.
Pimpinan Utama Madya
NIP. 19630721 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp. (0291) 431328-434353 Fax. (0291) 431328

Kudus, 11 April 2022

Nomor : 130.1.1/991/25.01/2022
Sifat :
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Pengiriman Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian BPPKAD Tahun 2022.

Kepada
Yth. INSPEKTUR
Kabupaten Kudus
di -
KUDUS

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 005/1738/08.01/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Schubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Badan	
2.	Kepala Bidang	
3.	Kasubbog / Kasubbid	
4.	Ka. UPT Pajak Daerah	

EKO DJUMARTONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 431328
KUDUS 59313**

DAFTAR ISI

Daftar Isi halaman

		DAFTAR ISI	I
		KATA PENGANTAR	III
BAB I		GAMBARAN UMUM	1
	A.	PENDAHULUAN	1
		1. Latar Belakang	2
		2. Organisasi	2
		3. Dasar Hukum	5
		4. Maksud dan Tujuan	5
		5. Manfaat	5
		6. Ruang Lingkup	5
	B.	SEKILAS TENTANG SPIP	6
		1. Pengertian SPIP	6
		2. Tujuan SPIP	6
		3. Unsur-unsur SPIP	6
BAB II		URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN	12
	A.	Penerapan SPIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus	12
	B.	Lingkungan Pengendalian	14
		1. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	14
		2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	15
		3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	15

	C.	Penilaian Risiko	17
		1. Pernyataan Tujuan	17
		2. Identifikasi Risiko	18
		3. Analisa Risiko	20
	D.	Kegiatan Pengendalian	23
		1. Kegiatan Pengendalian Terpasang	20
		2. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	21
	E.	Informasi dan Komunikasi	25
	F.	Pemantauan dan Evaluasi	26
BAB III		PENUTUP	28
		Lampiran	
		1. Rekap Jawaban atas Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian	
		2. Identifikasi Risiko	
		3. Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	
		4. Informasi dan Komunikasi	
		5. Daftar Rancangan Pemantauan	

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus periode Tahun 2022. Rencana Tindak Pengendalian Intern merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang berisi rumusan deskripsi dan target pelaksanaan kegiatan atau pembangunan infrastruktur pengendalian.

Rencana Tindak Pengendalian Intern merupakan uraian tentang upaya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern mengacu kepada lima unsure pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas system pengendalian intern yang ada, *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assessment (CSA)* dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dengan demikian organisasi yang system pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pegawai atas kerjasama yang baik telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini.

Komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Intern (RTP) ini sangat kami harapkan agar manfaat dan kontribusi konkrit upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi kenyataan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Badan	
2.	Kepala Bidang	
3.	Maniabiag / Kasubid	
4.	Ka. UPT Pejak Daerah	


EKO DJUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19681004 199303 1 006

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan Negara, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta untuk menciptakan *good governance* termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Penyelenggaraan SPIP dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila ditandai oleh eksistensi dua aspek yaitu aspek pengendalian intern dan aspek penerapannya.

Aspek desain pengendalian terkait dengan masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Sedangkan aspek penerapannya menyangkut efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, bahwa kekuatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

1. Latar Belakang

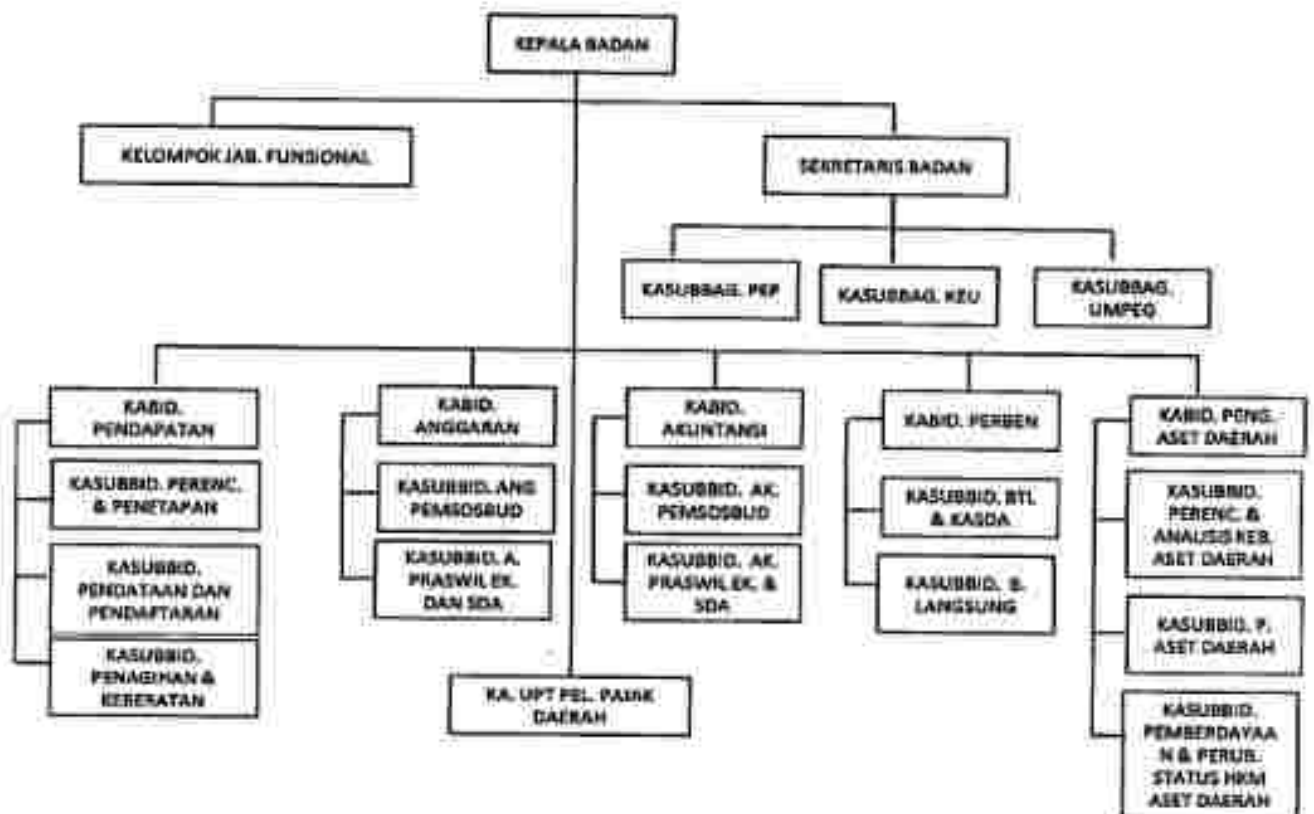
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun Rencana Tindak Pengendalian Intern, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Intern periode tahun 2021 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan pengendalian intern pada proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.

2. Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus

a. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan daerah kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus



Untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat dari tugas masing - masing sebagai berikut :

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- d. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- e. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 "Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;

- 2). Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
- 3). Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
- 4). Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah No. PER-500/K/2010;
- e. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- f. Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus Nomor 900/125/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP BPPKAD.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah merumuskan deskripsi dan target penyelesaian kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang perlu dibangun dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

5. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran perkembangan/program.

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Tindak Pengendalian Intern meliputi rancangan kebijakan dan prosedur untuk memperkuat kualitas lingkungan

pengendalian serta pengembangan atau perbaiki aktivitas pengendalian intern, sesuai dengan tingkat risiko yang teridentifikasi.

B. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset Negara/daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak *negative* keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;

- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *preventif* dan *mitigasi*. Pengendalian yang bersifat *preventif* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigasi* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

1) Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures*, dan lain-lain. Tujuan pemantauan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan apabila terdapat kelemahan atau kegagalan pengendalian, dapat segera ditemukan penyebabnya dan dilakukan perbaikan seperlunya.

2) Evaluasi Terpisah

Kegiatan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui kegiatan pembandingan antara pelaksanaan pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, serta menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Kriteria yang menjadi sebagai acuan evaluasi tidak berbeda dengan kriteria pemantauan berkelanjutan, yaitu kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures*, dan lain-lain. Kegiatan evaluasi terpisah dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, baik dilaksanakan secara mandiri maupun oleh evaluator independen dari luar organisasi.

3) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaksanaan audit, baik oleh Inspektorat maupun BPK-RI, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pelaksanaan audit atau reviu lainnya akan menghasilkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pimpinan organisasi harus tanggap dan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil kegiatan audit atau reviu lainnya, agar efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern semakin kuat.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi

dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. PENERAPAN SPIP DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Bupati Kudus telah menerbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Nomor 900/125 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, yang memiliki tugas:

1. Merencanakan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
2. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan permasalahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
3. Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
4. Melaksanakan administrasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
5. Menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. FGD melibatkan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagai responden yang terdiri dari unsur unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian/*Control Environment Evaluation* (CEE)

Tujuan CEE adalah untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.

Metode yang dilakukan dalam CEE adalah menggunakan media kuesioner dan melakukan validasi atas jawaban persepsi CEE dari pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagai responden yang terdiri dari unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf.

Langkah atau tahapan dalam melakukan CEE sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kuesioner CEE atas delapan sub unsur Lingkungan Pengendalian;
- b. Menentukan sample pegawai yang dijadikan responden;
- c. Melakukan tabulasi atas jawaban responden;
- d. Melakukan rekapitulasi jawaban dan penilaian CEE atas kuesioner evaluasi lingkungan pengendalian, berdasarkan modus jawaban responden;
- e. Melakukan validasi atas hasil penilaian berdasarkan modus jawaban responden;
- f. Membuat kesimpulan hasil penilaian atas 8 unsur Lingkungan Pengendalian yang ada dengan 4 kategori yaitu "Memadai, Cukup Memadai, Belum Memadai dan Tidak Memadai".
- g. Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) atas sub unsur lingkungan pengendalian yang "Tidak Memadai dan Kurang Memadai", berikut

penetapan waktu dan penanggungjawab kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampumendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- h. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap RTP Lingkungan Pengendalian yang telah disusun.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko dilakukan dengan metode *Control Self Assessment (CSA)*, yaitu proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern secara mandiri. Proses penilaian risiko diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor Internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Hasil penilaian risiko tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian yang telah disepakati diformalkan ke dalam Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Rencana Tindak Pengendalian terdiri atas dua paket rencana aksi yaitu :

- a. Rencana Kegiatan Penguatan Lingkungan Pengendalian;
- b. Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko yang relevan dengan tujuan utama organisasi.

B. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan

kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standard etika dan perilaku.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi (*)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<i>Cukup Memadai</i>
2	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Cukup Memadai</i>
3	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Cukup Memadai</i>
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<i>Cukup Memadai</i>
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	<i>Cukup Memadai</i>
6	Kebijakan Pengembangan SDM	<i>Cukup Memadai</i>
7	Pengawasan Internal yang Efektif	<i>Cukup Memadai</i>
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	<i>Memadai</i>

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Pengelolaan pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk

menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

a. Komitmen Terhadap Kompetensi

- 1) SDM yang tersedia kurang memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merencanakan melakukan penambahan pegawai. Penambahan pegawai diperlukan karena kekurangan pegawai menyebabkan beberapa pegawai memegang berbagai tugas yang tumpang tindih. Ketika pegawai melakukan banyak tugas maka hasil yang diberikan pun kurang maksimal. Dengan penambahan pegawai maka setiap pegawai memiliki tupoksi yang jelas yang telah disesuaikan dengan perencanaan yang disusun. Strategi bisa dijalankan lebih maksimal karena masing-masing pegawai fokus untuk menjalankan tugas sesuai strategi dan perencanaan yang telah disusun.

b. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

- 1) Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM kurang memadai

Semua pegawai harus memiliki kompetensi untuk menjalankan tupoksinya. Pegawai yang memiliki kompetensi dimulai dengan mempelajari dasar-dasar ilmu yang sesuai dengan tupoksinya. Mengikutsertakan pegawai pada diklat-diklat teknis merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh. Organisasi diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan untuk mengikuti pelatihan para pegawai. Kebijakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai akan mempermudah organisasi untuk mengatur pengelolaan SDM. Ketika para pegawai sudah memiliki kompetensi maka pencapaian visi dan misi dapat terwujud.

- 2) Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (*reward*) tidak memadai

Penghargaan atas prestasi kerja merupakan salah satu bentuk apresiasi atas kinerja/prestasi pegawai baik dari unsur penilaian

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kedisiplinan. Pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, belum ada kebijakan yang mengatur pemberian penghargaan atas kinerja/prestasi pegawai.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus perlu menyusun sistem penilaian kinerja pegawai yang terstruktur dan sistematis. Hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penerapan pemberian penghargaan sehingga pegawai diberikan penghargaan yang memadai sesuai prestasi kerja.

Rincian hasil evaluasi lingkungan pengendalian lihat lampiran 1.

C. PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi tujuan strategis dan tujuan kegiatan, identifikasi risiko dan analisis risiko guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan strategis yaitu *"Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah"*.

2. Identifikasi Risiko

Risiko-risiko yang teridentifikasi melalui *forum Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Risiko
1.	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja	Keterlambatan laporan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
2.	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan dan penyampaian SPJ
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan organisasi
4.	Peningkatan kapasitas sarpras aparatur	Markup harga oleh penyedia dan pelaksana kegiatan serta penyedia tidak kompeten sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak selesai
5.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target realisasi pajak daerah tidak tercapai
6.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dan penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan analisis/kajian/kebijakan tidak selesai
7.	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kepatuhan wajib pajak/ wajib retribusi
8.	Penyediaan sarpras pengelolaan pajak daerah	Keterbatasan Sarpras pengelolaan pajak daerah
9.	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	Tidak semua obyek pajak bisa terdaftar/ termutakhirkan.
10.	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Data base tidak dapat disajikan dengan baik.
11.	Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai tercatat tidak sesuai dengan nilai faktual
12.	Penetapan wajib pajak daerah	Data wajib pajak tidak sesuai kondisi riil
13.	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	SOP belum dipahami Wajib Pajak
14.	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Data tidak sesuai/ tidak valid
15.	Penagihan pajak daerah	Target penagihan tidak tercapai
16.	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Pengajuan tidak dapat diproses
17.	Pengendalian, pemeriksaan dan	Target realisasi pajak daerah tidak

NO	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Risiko
	pengawasan pajak daerah	tercapai
18	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Target realisasi retribusi daerah tidak tercapai
19	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS
20	Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Keterlambatan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
21	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Keterlambatan Penetapan APBD
22	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Keterlambatan penetapan Perubahan APBD
23	Pengelolaan Kas Daerah	SIPD Penatausahaan yang belum bisa digunakan
24	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Money Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Keterlambatan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
25	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan penyeteroran perhitungan pilkuk ketiga	Data tidak tersedia secara lengkap dan akurat
26	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Pelaksanaan APBD tidak tersusun
27	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Keterlambatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
28	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan pemerintah daerah	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
29	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan	Keterlambatan Penyusunan Laporan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan

NO	Kegiatan/Sub.Kegiatan	Risiko
	Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
30	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi
31	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi
32	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Keterlambatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
33	Penyusunan Standar Harga dan Analisa Standar Biaya	Tim ASB dan SSH tidak optimal dalam melaksanakan kegiatan penyusunan ASB dan SSH.
34	Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Data tidak tersedia secara lengkap
35	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Keterlambatan penyelesaian penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan BMD
35	Penatausahaan BMD	Penatausahaan BMD tidak optimal
37	Pengamanan BMD	Pengamanan BMD tidak optimal
38	Penilaian BMD	Penilaian BMD terbatas
39	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD tidak optimal

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 2

3. Analisa Risiko

Untuk mendukung terselenggaranya proses analisa risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko sebagai berikut :

- 1) Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 3 (tiga) tingkatan, sebagai berikut :

Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	<i>Hampir pasti terjadi</i>	<i>Terjadi setiap tahun</i>
3	<i>Kemungkinan besar</i>	<i>Terjadi 1 kali dalam 2 tahun</i>
2	<i>Kemungkinan Kecil</i>	<i>Terjadi 1 kali dalam 3 tahun</i>
1	<i>Hampir mustahil terjadi</i>	<i>Tidak terjadi lebih dari 3 tahun</i>

Dimensi Pengukuran dampak risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	<i>Luar Biasa</i>	<i>Mengancam Organisasi secara keseluruhan</i>
3	<i>Besar</i>	<i>Mengancam sebagian program</i>
2	<i>Rendah</i>	<i>Mengganggu sebagian kegiatan</i>
1	<i>Tidak Signifikan</i>	<i>Mengganggu administrasi</i>

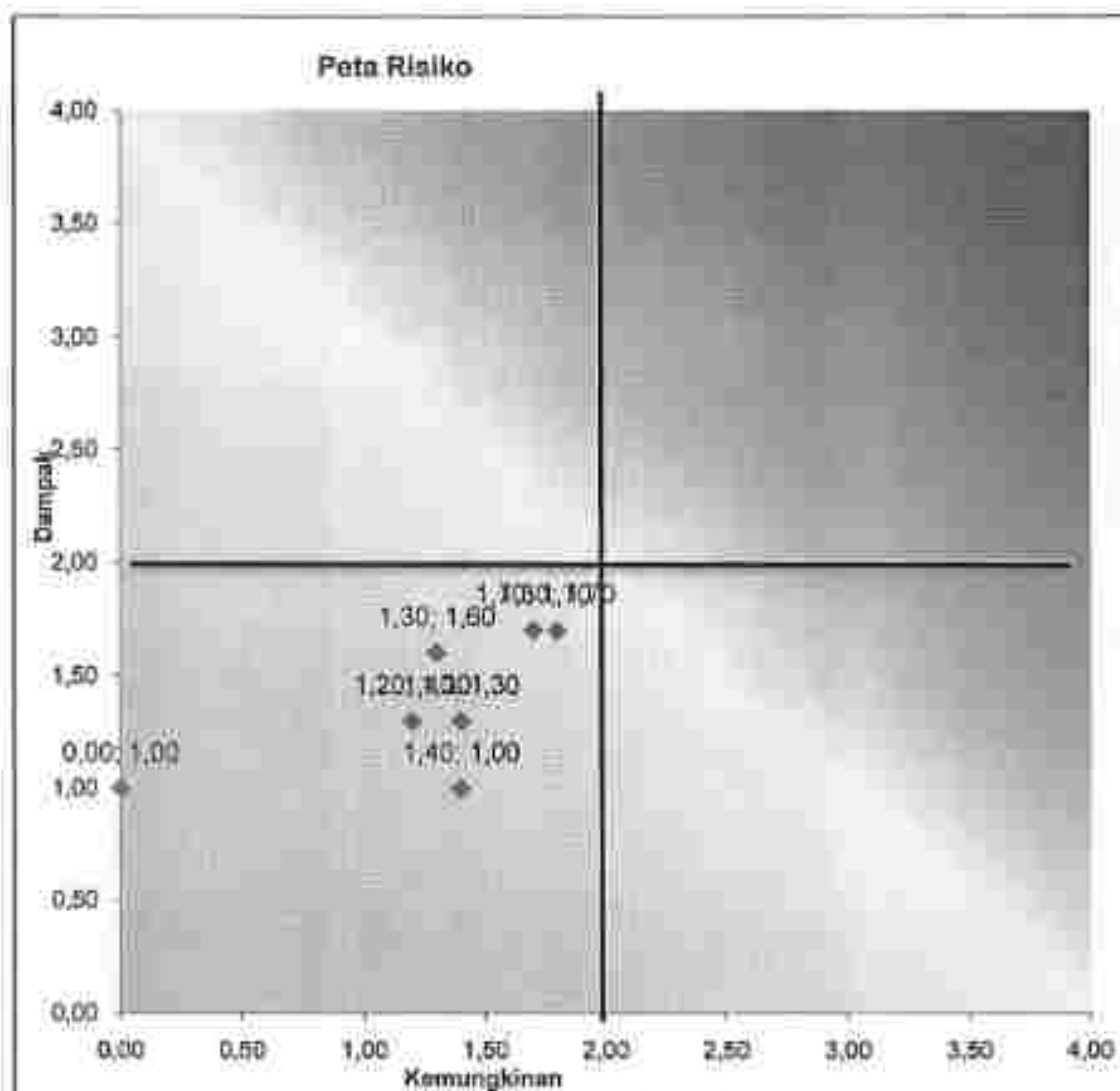
Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

Konsekuensi / Dampak	Luar Biasa (4)				
	Besar (3)				
	Rendah (2)				
	Tdk Signifikan (1)				
		Hampir Mustahil (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)
		Kemungkinan			

Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

Hasil analisa risiko pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :



D. KEGIATAN PENGENDALIAN

Hasil penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

1. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan.

2. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Pengendalian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru, perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Risiko	Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
Keterlambatan laporan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Komunikasi dan koordinasi yang intensif
Keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan, dan keterlambatan penyampalan SPJ	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi administrasi keuangan
Diklat yang dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi pemilihan Diklat sesuai yang dibutuhkan organisasi
Markup harga oleh penyedia dan pelaksana kegiatan serta Penyedia tidak kompeten sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak selesai	Ada pengendalian dari PPKom serta Tim seleksi Penyedia lebih teliti dan kompeten
Rencana dan target realisasi yang tidak terukur.	Target realisasi pajak daerah tidak tercapai
Analisa kebijakan yang tidak tepat	Laporan analisis/kajian/kebijakan tidak selesai
Sosialisasi pajak tidak bisa menyeluruh	Kepatuhan wajib pajak/ wajib retribusi
Keterbatasan Sarpras pengelolaan pajak daerah	Keterbatasan Sarpras pengelolaan pajak daerah

Risiko	Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
Data tidak tersedia secara lengkap dan valid	Tidak semua obyek pajak bisa terdaftar/ termutakhirkan
Basis data pajak yang hilang	Data base tidak dapat disajikan dengan baik
Tidak obyektifnya nilai transaksi (BPHTB) dan kurang update data base PBB P2	Nilai tercatat tidak sesuai dengan nilai faktual
Data wajib pajak tidak valid	Data wajib pajak tidak sesuai kondisi riil
Keterbatasan pemahaman aturan pajak daerah	SOP belum dipahami Wajib Pajak
Data yang dilaporkan tidak valid	Data tidak sesuai/ tidak valid
Obyek pajak yang sudah tutup/ WP di luar kota	Target penagihan tidak tercapai
Tidak terbayarnya ketetapan pajak daerah	Pengajuan tidak dapat diproses
Kurangnya SDM pajak daerah	Target realisasi pajak daerah tidak tercapai
Kurangnya SDM pengawasan pajak daerah	Target realisasi retribusi daerah tidak tercapai
Keterlambatan penyusunan KUA dan PPAS	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait.
Keterlambatan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait.
Keterlambatan Penetapan APBD	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait.
Keterlambatan penetapan Perubahan APBD	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait.
SIPD Penatausahaan yang belum digunakan	Migrasi ke SIMDA lagi
Keterlambatan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Pemantauan pelaksanaan pada OPD pengelola Dana Transfer dan Dana Perimbangan
Data tidak tersedia secara lengkap dan akurat	Pemantauan dengan Aplikasi Kasda Online
Petunjuk Pelaksanaan APBD tidak tersusun	Sosialisasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah bagi PPK, PPTK, Kasubag PEP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Keterlambatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi dengan OPD terkait

Risiko	Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan OPD terkait
Keterlambatan Penyusunan Laporan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan OPD terkait
Kebijakan Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi	Menyesuaikan Regulasi Terbaru
Sistem dan Prosedur Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi	Menyesuaikan Regulasi Terbaru
Keterlambatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dengan OPD terkait
Tim ASB dan SSH tidak optimal dalam melaksanakan kegiatan penyusunan ASB dan SSH.	Mengatur jadwal pembahasan dengan cermat
Data tidak tersedia secara lengkap	Pemenuhan data GPD
Keterlambatan penyelesaian penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan BMD	Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait
Penatausahaan BMD tidak optimal	Pemenuhan SDM yang kompeten
Pengamanan BMD tidak optimal	Pemenuhan SDM yang kompeten
Penilaian BMD terbatas	Pelaksanaan Penilaian BMD sesuai dengan kebutuhan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD tidak optimal	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara bertahap kepada OPD

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 3

E. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 (enam) bulan agar dapat dilakukan evaluasi sehingga komunikasi bisa lebih efektif. Selain itu, hasil evaluasi akan digunakan

sebagai bahan untuk mengambil tindakan yang bersifat preventif terhadap kendala yang muncul untuk segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan sebagai bentuk evaluasi berisi hal-hal antara lain:

1. Media/bentuk/sarana pengkomunikasian yang digunakan;
2. Penyedia informasi/penanggung jawab tindak lanjut;
3. Penerima informasi/tindak lanjut;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Kendala /hambatan yang muncul;
6. Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian rencana informasi dan komunikasi lihat Lampiran 4.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan apakah Sistem Pengendalian Intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan pengendalian yang diperlukan telah dilaksanakan guna perbaikan SPI yang terpasang. Pemantauan dan Evaluasi diselenggarakan atas rencana pengendalian resiko yang masih dibutuhkan sesuai dalam daftar resiko yang dibangun dalam RTP. Pemantauan dan evaluasi dilakukan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci secara kontinyu dan periodik untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing-masing OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, atau oleh pihak luar seperti Inspektorat Kabupaten Kudus /BPKP/BPK. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah :

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;

- d. Prosedur pemantauan;
- e. Waktu pelaksanaan.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 5

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Kudus selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rincian Rancangan Pemantauan lihat Lampiran 5.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil Asistensi atas Implementasi Manajemen Resiko BPPKAD Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat, kualitas dokumen RTP masih belum sesuai ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kudus, April 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS


EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681004 199303 1 006

IDENTIFIKASI RISIKO BPPKAD KABUPATEN KUDUS

VISI Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

No	Kejadian	Tujuan	Risiko		Penyebab		GUK	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1). Meningkatkan Komandirin Keuangan Daerah 2). Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Integritas	Capaian realisasi pajak dan retribusi daerah tidak tercapai	Bidang Pendapatan	Penetapan target tidak melalui kajian yang valid/wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
			Data tidak tersedia secara lengkap dan akurat	Bidang Pendapatan	Pengelolaan databased belum optimal/ kurangnya petugas pendata	BPPKAD	C	Polansi pendapatan ada, tetapi tidak didukung dengan sistem data yang valid	Pemkab
			Target pajak dan retribusi daerah tidak tercapai	Bidang Pendapatan	Wajib pajak tidak dapat dihentikan ketika ditagih/lemahnya koordinasi dengan petugas kmg desa	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
			Keterlambatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB dan BPHTB	Kepala IPTD Pengelola Pajak Daerah	Keterbatasan SDM/petugas pendata dan petugas yang mengoperasikan IT.	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterlambatan Penetapan APBD	Bidang Anggaran	Kurangnya komitmen kepala OPD dan Pimpinan DPRD	BPPKAD	C	Pelaksanaan kegiatan tertambat/ pembangunan tertambat	Pemda dan Masyarakat
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT) tidak berjalan optimal	Bidang Perbendaharaan	Adanya keterlambatan update user oleh Bendahara	BPPKAD	C	Keterlambatan pengajuan SPM	Pemda dan Masyarakat
			Petunjuk Pelaksanaan APBD tidak tersusun	Bidang Perbendaharaan	Tidak adanya pedoman/acuan di masing-masing pengelola keuangan OPD	BPPKAD	C	Terjadinya temuan di OPD oleh Inspektori/BPK	Pemda

No	Kegiatan	Tujuan	Risiko		Penyebab		CUC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Finas yang Terkena
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterlambatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD	Bidang Akuntansi	Kurangnya komitmen OPD dalam melaporkan Laporan Keuangan OPD terlambat	BPPKAD	C	Keterlambatan Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD/ Pengurang nilai Opini dari BPK	Pemda dan Masyarakat
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tidak terdapat	Bidang Aset	Belum adanya Juknis tentang Standar Kebutuhan BMD di masing-masing OPD	BPPKAD	C	Inefisiensi Anggaran	Pemda
			Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal	Bidang Aset	BMD belum tercatat dan belum di dukung dengan dokumen yang sah	BPPKAD	C	Kerugian daerah	Pemda
			Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai	Bidang Aset	Adanya klaim kepemilikan tanah Pemda oleh masyarakat / pemanfaatan tanah tanpa ijin	BPPKAD	C	Kerugian daerah	Pemda

**REKAP JAWABAN ATAS KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN KUESIONER					Modus Jawaban	JAWABAN KUESIONER CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)	HASIL VALIDASI	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)	KETERANGAN
		1	2	3	4	5					
1	2	3					4	5	6	7	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						3	Cukup Memadai			
1	Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	2	11	17	2	3		Cukup Memadai			
2	Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)	2	10	20	0	3		Cukup Memadai			
3	Rekan-rekan kerja berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	0	8	24	0	3		Cukup Memadai			
4	Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	9	4	17	2	3		Cukup Memadai			
5	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk	1	4	19	8	3		Cukup Memadai			
6	Dokumen pernyataan aturan perilaku disampaikan kepada seluruh pegawai.	10	1	21	0	3		Cukup Memadai			
7	Contoh bagaimana praktik aturan perilaku dalam situasi sehari-hari	7	4	16	5	3		Cukup Memadai			
8	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	16	7	9	0	1		Tidak Memadai			
9	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku	12	11	9	0	1		Tidak Memadai			
10	Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku	12	7	10	3	1		Tidak Memadai			
11	Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai	0	18	8	6	2		Kurang Memadai			
12	Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai	4	13	15	0	2		Kurang Memadai			
13	Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	8	9	9	6	2		Kurang Memadai			
14	Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku	9	8	14	1	2		Kurang Memadai			
15	Pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan	8	9	7	8	2		Kurang Memadai			
16	Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	2	18	6	6	2		Kurang Memadai			
17	Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku	15	5	10	2	1		Tidak Memadai			
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						11/1	MNA			
18	Instansi _____ strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	15	5	12	0	1		Tidak Memadai			
19	Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	1	5	25	1	3		Cukup Memadai			
20	Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi	12	13	5	2	2		Kurang Memadai			
21	Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut	5	18	7	2	2		Kurang Memadai			
22	Pimpinan di instansi Bapak/Ibu telah memiliki pengalaman kerja yang luas (tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja)	0	12	13	7	3		Cukup Memadai			
23	Kompetensi SDM dipantau secara efektif	11	8	11	0	2		Kurang Memadai			

1	2	3			4	5	6	7
24	Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya	11	3	10	8	1	Cukup Memadai	
25	Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	13	12	3	4	1	Tidak Memadai	
26	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting instansi	24	3	5	0	1	Tidak Memadai	
27	Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik	1	13	6	12	4	Memadai	
28	Assesment/penilaian kompetensi dari individu kunci dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap	10	4	18	0	3	Cukup Memadai	
29	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai dilakukan	15	7	4	5	1	Tidak Memadai	
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF					3	Cukup Memadai		
30	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal	1	12	18	1	3	Cukup Memadai	
31	Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat	0	4	27	1	3	Cukup Memadai	
32	Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	14	0	18	0	3	Cukup Memadai	
33	Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP	1	0	18	13	3	Cukup Memadai	
34	Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi	15	2	14	1	1	Tidak Memadai	
35	Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait	15	3	9	5	1	Tidak Memadai	
36	Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern	3	1	27	1	3	Cukup Memadai	
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN					BN/A	RNA		
37	Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya	0	10	15	7	3	Cukup Memadai	
38	Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu	0	15	16	1	3	Cukup Memadai	
39	Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi	0	11	19	2	3	Cukup Memadai	
40	Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian	12	2	17	1	3	Cukup Memadai	
41	Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai	10	1	6	15	4	Memadai	
42	Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci telah ditetapkan dan dimutakhirkan	17	10	5	0	1	Tidak Memadai	
43	Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala	20	9	0	1	1	Tidak Memadai	

1	2	3				4	5	6	7
E.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT					2	Kurang Memadai		
44	Pimpinan melakukan rewu dan evaluasi secara berjerjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP	2	19	2	9	2	Kurang Memadai		
45	Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP	6	14	12	0	2	Kurang Memadai		
46	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal	6	5	11	10	3	Cukup Memadai		
47	Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat	0	0	17	15	3	Cukup Memadai		
48	Peljabat kunci (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya	4	12	12	4	3	Cukup Memadai		
49	Kewenangan direviu dan dimutakhirkan secara periodik	16	7	8	1	1	Tidak Memadai		
50	Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai	6	4	4	18	4	Memadai		
51	Batasan kewenangan diverifikasi dan diuji	3	16	9	4	2	Kurang Memadai		
52	Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan	0	11	15	6	3	Cukup Memadai		
F.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBUJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA					2	Kurang Memadai		
53	Instansi kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	12	18	2	0	2	Kurang Memadai	Cukup Memadai	
54	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM didokumentasikan secara formal	0	4	13	15	4	Memadai		
55	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM disosialisasikan kepada seluruh pegawai	13	9	10	0	1	Cukup Memadai		
56	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM dipahami oleh seluruh pegawai	20	0	6	6	1	Tidak Memadai		
57	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	7	10	2	13	2	Kurang Memadai		
58	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan	12	7	15	3	3	Cukup Memadai		
59	Pimpinan menetapkan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan	8	10	4	10	2	Kurang Memadai	NA	
60	Pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik	8	13	8	3	2	Kurang Memadai		
61	Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya	12	1	16	3	3	Cukup Memadai		
62	Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)	5	9	9	9	3	Cukup Memadai		
63	Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)	5	12	13	2	2	Kurang Memadai		
64	Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan	10	3	19	0	3	Cukup Memadai		
65	Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesetiaan ber-SPIP	14	3	15	0	2	Kurang Memadai		
66	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	10	12	7	3	Cukup Memadai		

1	2	3				4	5	6	7
67	Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan interpersonal skill	4	3	24	1	3	Cukup Memadai		
68	Instansi -- sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan	11	21	0	0	2	Kurang Memadai		
69	Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan	2	15	10	5	2	Kurang Memadai		
70	Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan	8	9	13	2	2	Kurang Memadai		
G	APIP melakukan revaluasi atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik					2	Kurang Memadai		
71	APIP melakukan revaluasi atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik	8	7	16	1	3	Cukup Memadai		
72	APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.	4	17	8	3	2	Kurang Memadai		
73	APIP berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi	2	20	4	6	2	Kurang Memadai		
74	APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko	2	15	11	4	2	Kurang Memadai		
75	APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik	5	3	17	7	3	Cukup Memadai		
76	APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik	2	5	4	21	4	Memadai		
77	APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik	3	18	5	6	2	Kurang Memadai		
78	APIP melakukan revaluasi atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	20	6	4	2	1	Tidak Memadai		
79	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP ditindaklanjuti	1	11	2	18	4	Memadai		
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
80	Pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	2	5	24	1	3	Cukup Memadai		
81	Pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)	0	8	11	13	4	Memadai		

IDENTIFIKASI RISIKO BPPKAD KABUPATEN KUDUS

VISI Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab		CRUC	Dampak	
			Urutan	Pemik	Urutan	Sumber		Urutan	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Capaian realisasi pajak dan retribusi daerah tidak tercapai	Bidang Pendapatan	Penetapan target tidak melalui kajian yang valid/wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
			Data tidak tersedia secara lengkap dan akurat	Bidang Pendapatan	Pengelolaan database belum optimal/ kurangnya petugas pendata	BPPKAD	C	Potensi pendapatan ada, tetapi tidak didukung dengan sistem data yang valid	Pemkab
			Target pajak dan retribusi daerah tidak tercapai	Bidang Pendapatan	Wajib pajak tidak dapat ditemukan ketika ditagih/lemahnya koordinasi dengan petugas lingg desa	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
			Keterlambatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB dan BPHTB	Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah	Keterbatasan SDM/petugas pendata dan petugas yang mengoperasikan IT	BPPKAD	C	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Pemkab
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterlambatan Penetapan APBD	Bidang Anggaran	Kurangnya komitmen kepala OPD dan Pimpinan DPRD	BPPKAD	C	Pelaksanaan kegiatan tertambat/ pembangunan terhambat	Pemda dan Masyarakat
3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT) tidak berjalan optimal	Bidang Perbendaharaan	Ada ketakutan dari Bendahara dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai (TNT) karena salah transfer ke rekening penyedia apabila rekening tidak ada pada Bank Jateng	BPPKAD	C	Keterlambatan pengajuan SPM	Pemda dan Masyarakat
			Petunjuk Pelaksanaan APBD tidak tersusun	Bidang Perbendaharaan	Tidak adanya pedoman/acuan di masing-masing pengelola keuangan OPD	BPPKAD	C	Terjadinya temuan di OPD oleh Inspektaris/BPK	Pemda

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko		Penyebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keterlambatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD	Bidang Akuntansi	Kurangnya komitmen OPD dalam melaporkan Laporan Keuangan OPD terlambat	BPPKAD	C	Keterlambatan Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban APBD/ Pengurangan nilai Opini dari BPK	Pemda dan Masyarakat
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) tidak tersusun	Bidang Aset	Belum adanya Juknis tentang Standar Kebutuhan BMD di masing-masing OPD	BPPKAD	C	Inefisiensi Anggaran	Pemda
			Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal	Bidang Aset	BMD belum tercatat dan belum di dukung dengan dokumen yang sah	BPPKAD	C	Kerugian daerah	Pemda
			Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai	Bidang Aset	Adanya klaim kepemilikan tanah Pemda oleh masyarakat / pemanfaatan tanah tanpa izin	BPPKAD	C	Kerugian daerah	Pemda

RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BPPKAD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	RISIKO	PENGENDALIAN				FEMILIK/ PENANGSUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA		CELAH			YANG MASIH DIBUTUHKAN
				URAIAN	E/ KE/ TE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Sistem Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Ketertambatan laporan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Komunikasi dan koordinasi yang intensif	Komunikasi, koordinasi dan evaluasi			Admin PEP Bidang	Sub.Koordinator PEP	Januari s/d Desember
2	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Keterlambatan gaji tunjangan dan penyampaian SPJ	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi administrasi keuangan	Koordinasi, Komunikasi dan Verifikasi			Kecepatan, ketepatan dalam pelaksanaan adm keuangan	Kasubbeg Keuangan	Januari s/d Desember
3	Peningkatan Kapasitas SDM	Diklat Dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi pemilihan Diklat yang sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi Penawaran Diklat yang masuk			Tidak hanya menunggu penawaran Diklat yang masuk	Kasubbeg Umpeg	Januari s/d Desember
4	Peningkatan kapasitas Sarpras Aparatur	Markup harga oleh penyedia dan pelaksanaan kegiatan serta penyedia tidak kompeten	Ada pengendalian dari PPKom serta Tim Seleksi Penyedia lebih teliti dan kompeten	Pengadaan sesuai anggaran yang ada/DPA			Pengadaan sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada	Kasubbeg Umpeg	Januari s/d Desember
5	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target realisasi pajak daerah tidak tercapai	Koordinasi, evaluasi dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan pajak daerah			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
6	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dan penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan analisis/kegiatan/kebijakan tidak selesai	Koordinasi dan evaluasi berkala	Pemenuhan data yang dibutuhkan tepat waktu			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
7	Penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah	Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi belum optimal	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan sosialisasi Pajak Daerah			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember
8	Penyediaan sarpras pengelolaan pajak daerah	Keterbatasan sarpras pengelolaan pajak daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember
9	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak	Tidak semua obyek pajak bisa terdaftar/termutakhirkan	Pemantauan dan peninjauan lapangan	Penyuluhan prioritas OPWP potensial			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
10	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Database tidak bisa diakses dengan baik	Koordinasi dan evaluasi	Pemutakhiran dan pencadangan basis data pajak daerah			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember

NO	KEGIATAN	RISIKO	PENGENDALIAN				PENILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA		CELAH			YANG MASIH DIBUTUHKAN
				URAIAN	E/ KE/ TE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai tercatat tidak sesuai dengan nilai faktual	Verifikasi dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
12	Penetapan wajib pajak daerah	Data wajib pajak tidak sesuai kondisi riil	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan konfirmasi, verifikasi, dan pemutakhiran data wajib pajak			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
13	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	SCP belum dipahami WP	Verifikasi dan konfirmasi	Penagihan dilakukan secara rutin			Verifikasi dan konfirmasi	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember
14	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Data tidak sesuai/tidak valid	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan			Koordinasi dan peninjauan lapangan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember
15	Penagihan pajak daerah	Target penagihan tidak tercapai	Surat menyurat dan kunjungan lapangan	Penagihan dilakukan secara rutin			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
16	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Pengajuan tidak dapat diproses	Verifikasi dan konfirmasi	Pelaksanaan verifikasi berkas dan konfirmasi WP			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
17	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Target realisasi pajak daerah tidak tercapai	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses penungutan/penagihan			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
18	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Target realisasi retribusi daerah tidak tercapai	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses penungutan retribusi daerah			Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember
19	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Keterlambatan penetapan KUA dan PPAS	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait			Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember

NO	KEGIATAN	RISIKO	YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA		CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN
				URAIAN	E/ KE/ TE				
20	Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Keterlambatan penetapan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait			Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember
21	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Keterlambatan penetapan APBD	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait			Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember
22	Koordinasi dan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Keterlambatan penetapan perubahan APBD	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait			Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember
23	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	SIPD Penatausahaan yang bim bisa digunakan	Sosialisasi SIPD Penatausahaan	Migrasi ke Simda lagi			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember
24	Koordinasi fasilitasi, sinkronisasi, supervisi, money pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Keterlambatan penerimaan dana perimbangan dan dana transfer	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Pemantauan pelaksanaan pada OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember
25	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan penyeteroran perhitungannya pihak ketiga	Data tidak tersedia secara lengkap dan akurat	Monitoring dan evaluasi	pemantauan dengan aplikasi Kasda Online			Masih menggunakan menggunakan aplikasi Kasda Online	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember

NO	KEGIATAN	RISIKO	PENGENDALIAN				PEMILIH/ PERANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA		CELAH			YANG MASIH DIBUTUHKAN
				URAIAN	E/ KE/ TE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	Penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Potunjuk Pelaksanaan APBD tidak tersusun	Fasilitasi Bimbingan/konsultasi	Sosialisasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK, PPTK, Kasubag PEP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu			Laporan dalam bentuk Nota Dinas	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember
27	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Keterlambatan penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Koordinasi dengan SKPD			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember
28	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan pemerintah daerah	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Koordinasi dengan SKPD			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember
29	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Keterlambatan Penyusunan Laporan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Koordinasi dengan SKPD			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember
30	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Kebijakan Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Menyesuaikan regulasi terbaru			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember
31	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi belum menyesuaikan Perubahan Regulasi	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Menyesuaikan regulasi terbaru			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember

NO	KEGIATAN	RISIKO	PENGENDALIAN				PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA		CELAH			YANG MASIH DIBUTUHKAN
				URAIAN	E/ KE/ TE				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Keterlambatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Facilitasi bimbingan/konsultasi	Koordinasi dengan SKPD			Masih menggunakan SIMDA BPKP	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember
33	Penyusunan Standar Harga dan Analisa Standar Biaya	Tim tidak dapat optimal dalam melaksanakan kegiatan penyusunan SSH dan ASB	Koordinasi secara intens antar anggota Tim	Mengatur jadwal pembahasan dengan cermat			Membuat laporan	Kabid Aset	Januari s/d Desember
34	Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Data tidak tersedia secara lengkap	Koordinasi dengan Bagian Organisasi	Pemenuhan data			Membuat laporan	Kabid Aset	Januari s/d Desember
35	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Keterlambatan penyelesaian penyusunan regulasi terkait Pengelolaan BMD	Koordinasi secara intens dengan pihak terkait	Koordinasi dengan pihak terkait			Membuat laporan	Kabid Aset	Januari s/d Desember
36	Penatausahaan BMD	Penatausahaan BMD tidak dapat optimal	Pemenuhan SOM	Pemenuhan SOM			Mengoptimalkan SDM yang ada	Kabid Aset	Januari s/d Desember
37	Pengamanan BMD	Pengamanan BMD tidak dapat optimal	Pengajuan Personil ke BKPP	Pemenuhan SOM			Mengoptimalkan SDM yang ada	Kabid Aset	Januari s/d Desember
38	Penilaian BMD	Penilaian BMD terbatas	Koordinasi dengan Sekretariat	Pelaksanaan Penilaian BMD sesuai dengan kebutuhan			Membuat laporan	Kabid Aset	Januari s/d Desember
39	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD tidak optimal	Koordinasi dengan Pengurus Barang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bertahap kepada Perangkat			Membuat laporan	Kabid Aset	Januari s/d Desember

**INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BPPKAD KABUPATEN KUDUS**

No	Kegiatan Pengendalian	Informasi Pengendalian	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Ditujukan Kepada	Waktu
1		3	4	5	6
1	Komunikasi dan koordinasi yang intensif	Koordinasi komunikasi	Rapat dan Surat	Sekretariat dan Bidang-Bidang	Januari s/d Des
2	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi	Koordinasi, Verifikasi	Rapat, Surat, WA	PA, PPK SKPD, PPTK, Bendahara	Januari s/d Des
3	Seleksi pemilihan Diklat yang sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi penawaran Diklat yang masuk	Rapat/ Surat	Kepala BKPP	Januari s/d Des
4	Ada pengendalian dari PPKom serta Tim Seleksi Penyedia lebih teliti dan kompeten	Pengadaan sesuai anggaran yang ada/DPA	Surat Penawaran	Pihak Ketiga/ Penyedia	Januari s/d Des
5	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan pajak daerah	Sosialisasi, komunikasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	OPD terkait dan Wajib Pajak/Wajib Pungut, pihak ketiga	Januari s/d Desember
6	Pemenuhan data yang dibutuhkan tepat waktu	Koordinasi dan evaluasi	Surat	OPD terkait dan Wajib Pajak/Wajib Pungut	Januari s/d Desember
7	Pelaksanaan sosialisasi Pajak Daerah	Sosialisasi dan koordinasi	Rapat dan Surat	Para pemangku kepentingan	Januari s/d Desember
8	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Komunikasi dan koordinasi	Rapat dan Surat	Kepala OPD/Teikomsel/Biznes/ Bank Jateng	Januari s/d Desember
9	Penyusunan prioritas OP/WP potensial	Koordinasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	OPD terkait dan nara sumber yang kompeten	Januari s/d Desember
10	Pemutakhiran dan pencadangan basis data pajak daerah	Koordinasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	Para pemangku kepentingan	Januari s/d Desember
11	Pelaksanaan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan	Koordinasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	Wajib Pajak/Wajib Pungut dan nara sumber yang kompeten	Januari s/d Desember
12	Pelaksanaan konfirmasi, verifikasi, dan pemutakhiran data wajib pajak	Koordinasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	Para pemangku kepentingan	Januari s/d Desember
13	Penagihan dilakukan secara rutin	Verifikasi dan konfirmasi	Rapat dan Surat	Wajib Pajak/Wajib Pungut dan nara sumber yang kompeten	Januari s/d Desember
14	Pelaksanaan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan	Verifikasi dan konfirmasi	Rapat dan Surat	Wajib Pajak/Wajib Pungut dan nara sumber yang kompeten	Januari s/d Desember
15	Penagihan dilakukan secara rutin	Koordinasi dan evaluasi	Rapat dan Surat	OPD terkait dan Wajib Pajak/Wajib Pungut	Januari s/d Desember
16	Pelaksanaan verifikasi berkas dan konfirmasi WP	Verifikasi dan konfirmasi	Rapat dan Surat	Wajib Pajak/Wajib Pungut dan nara sumber yang kompeten	Januari s/d Desember
17	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan pajak daerah	Komunikasi/Koordinasi	Surat/Rapat	Kepala OPD Pengelola Pendapatan	Januari s/d Desember
18	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan retribusi daerah	Komunikasi/Koordinasi	Surat/Rapat	OPD Pengelola Pendapatan	Januari s/d Desember
19	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi, konsultasi	Surat/Rapat	Kemendagri, Kepala OPD/Operator OPD, BPKP	Januari s/d Desember
20	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi, konsultasi	Surat/Rapat	Kemendagri, Kepala OPD/Operator OPD, BPKP	Januari s/d Desember
21	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi, konsultasi	Surat/Rapat	Kemendagri, Kepala OPD/Operator OPD, BPKP	Januari s/d Desember
22	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD	Koordinasi, konsultasi	Surat/Rapat	Kemendagri, Kepala OPD/Operator OPD, BPKP	Januari s/d Desember
23	Migrasi ke Simda lagi	Implementasi ke aplikasi Srede	Surat/Rapat	Kepala OPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu	Januari s/d Desember

No	Kegiatan Pengendalian	Informasi Pengendalian	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Ditujukan Kepada	Waktu
1		2	4	5	6
24	Pemantauan pelaksanaan pada OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Rapat Koordinasi	Surat/Rapat	Kepala Opd dan PPTK Pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Januari s/d Desember
25	pemantauan dengan aplikasi Kasda Online	Monitoring dan evaluasi lewat aplikasi Kasda Online	Telepon/Surat	Kepala OPD, Bendahara dan Bank Jalang	Januari s/d Desember
26	Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK, PPTK, Kasubag PEP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sosialisasi/Rapat	Surat/Rapat	Kepala OPD, PPK dan bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	Januari s/d Desember
27	Koordinasi dengan SKPD	Surat Edaran	Surat/Rapat	Kepala OPD	Januari s/d Desember
28	Koordinasi dengan SKPD	Surat Edaran	Surat/Rapat	Kepala OPD	Januari s/d Desember
29	Koordinasi dengan SKPD	Surat Permohonan koreksi	Surat	Kepala Bagian Hukum	Januari s/d Desember
30	Menyesuaikan regulasi terbaru	Nota Dinas	Surat	Bupati	Januari s/d Desember
31	Menyesuaikan regulasi terbaru	Nota Dinas	Surat	Bupati	Januari s/d Desember
32	Koordinasi dengan SKPD	Surat Edaran permintaan data awal	Surat	Kepala OPD	Januari s/d Desember
33	Mengatur jadwal pembahasan dengan Camat	Rapat Koordinasi	Surat Undangan	Tim/Kepanitiaan	Januari s/d Mei
34	Pemenuhan data	Koordinasi dengan Bagian Organisasi	Surat	Bagian Organisasi	Januari s/d Mei
35	Koordinasi dengan pihak terkait.	Koordinasi secara intern dg pihak terkait	Surat	Kepala OPD	Januari s/d Mei
36	Pemenuhan SDM	Pengajuan Personal ke BKPP	Surat	Kepala BKPP	Januari s/d Desember
37	Pemenuhan SDM	Pengajuan Personal ke BKPP	Surat	Kepala BKPP	Januari s/d Desember
38	Pelaksanaan Periferal BMD sesuai dengan kebutuhan	Koordinasi dengan Sekretariat	Surat	Sekretaris BPPKAD	Januari s/d Juli
39	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bertahap kepada Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Pengurus Berang	Surat	Kepala OPD	Januari s/d Desember

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN BPPKAD KABUPATEN KUDUS

No	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Komunikasi dan koordinasi yang intensif	Komunikasi koordinasi dan evaluasi	Komunikasi, koordinasi dan evaluasi	Sub Koordinator PEP	Januari s/d Desember	Evaluasi target kinerja per triwulan oleh Sekretaris, Kabid dan Ka.OPD
2	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi administrasi keuangan	Komunikasi, Koordinasi dan Verifikasi	Koordinasi dan verifikasi	Kasubag Keuangan	Januari s/d Desember	Verifikasi administrasi keuangan sesuai dengan tukiak APBD
3	Seleksi pemilihan Diklat yang sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi dan Verifikasi	Seleksi dan Verifikasi	Kasubag Umpeg	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
4	Ada pengendalian dari PPKom serta Tim Seleksi Penyedia lebih teliti dan kompeten	Seleksi dan Evaluasi	Seleksi dan Verifikasi	Kasubag Umpeg	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
5	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan pajak daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
6	Pemenuhan data yang dibutuhkan tepat waktu	Koordinasi dan evaluasi berkala	Koordinasi dan evaluasi berkala	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
7	Pelaksanaan sosialisasi Pajak Daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
8	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
9	Penyusunan prioritas OP/WP potensial	Pemantauan dan peninjauan lapangan	Pemantauan dan peninjauan lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait (DPMPTSP)	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan

No	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7
10	Pemutakhiran dan pencadangan basis data pajak daerah	Koordinasi dan evaluasi	Koordinasi dan evaluasi	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
11	Pelaksanaan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan	Verifikasi dan peninjauan lapangan	Verifikasi dan peninjauan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
12	Pelaksanaan konfirmasi, verifikasi, dan pemutakhiran data wajib pajak	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
13	Verifikasi dan konfirmasi	Verifikasi dan konfirmasi	Verifikasi dan konfirmasi	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember	Verifikasi dan konfirmasi
14	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Koordinasi dan peninjauan lapangan	Ka. UPT Pelayanan pajak Daerah	Januari s/d Desember	Koordinasi dan peninjauan lapangan
15	Penagihan dilakukan secara rutin	Surat-menyurat dan kunjungan lapangan	Surat-menyurat dan kunjungan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
16	Pelaksanaan verifikasi berkas dan konfirmasi WP	Verifikasi dan konfirmasi	Verifikasi dan konfirmasi	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
17	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan pajak daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
18	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemungutan retribusi daerah	Koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan	Kabid Pendapatan	Januari s/d Desember	Evaluasi kebijakan sesuai arahan pimpinan
19	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait
20	Implementasi sistem yang ada (SIPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait

No	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7
21	Implementasi sistem yang ada (SiPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait
	Implementasi sistem yang ada (SiPD dan SIMDA) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dan Bappeda	Kabid. Anggaran	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan sistem yang ada dan koordinasi dengan stakeholder serta OPD terkait
23	Migrasi ke Simda lagi	Sosialisasi SiPD Penatusahaan	Sosialisasi SiPD Penatusahaan	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
24	Pemantauan pelaksanaan pada OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD pengelola dana transfer dan dana perimbangan	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
25	pemantauan dengan aplikasi Kasda Online	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember	Masih menggunakan menggunakan aplikasi Kasda Online
26	Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK, PPTK, Kasubag PEP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fasilitasi Bimbingan/konsultasi	Fasilitasi Bimbingan/konsultasi	Kabid Perbendaharaan	Januari s/d Desember	Laporan dalam bentuk Nota Dinas
27	Koordinasi dengan SKPD	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
28	Koordinasi dengan SKPD	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
29	Koordinasi dengan SKPD	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP

No	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7
30	Menyesuaikan regulasi terbaru	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
31	Menyesuaikan regulasi terbaru	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Menyesuaikan dengan regulasi baru	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
32	Koordinasi dengan SKPD	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Fasilitasi bimbingan/konsultasi	Kabid Akuntansi	Januari s/d Desember	Masih menggunakan SIMDA BPKP
33	Mengatur jadwal pembahasan dengan cermat	Koordinasi secara inten antar anggota Tim	Koordinasi secara inten antar anggota Tim	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Membuat laporan
34	Pemenuhan data	Koordinasi dengan Bagian Organisasi	Koordinasi dengan Bagian Organisasi	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Membuat laporan
35	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi secara inten dengan pihak terkait	Koordinasi secara inten dengan pihak terkait	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Membuat laporan
36	Pemenuhan SDM	Pemenuhan SDM	Pemenuhan SDM	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan SDM yang ada
37	Pemenuhan SDM	Pengajuan Personil ke BKPP	Pengajuan Personil ke BKPP	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Mengoptimalkan SDM yang ada
38	Pelaksanaan Penilaian BMD sesuai dengan kebutuhan	Koordinasi dengan Sekretrariat	Koordinasi dengan Sekretrariat	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Membuat laporan
39	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bertahap kepada Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Pengurus Barang	Koordinasi dengan Pengurus Barang	Kabid Pengelolaan Aset	Januari s/d Desember	Membuat laporan